PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN TARIF KONSERVASI DI DISTRIK KOTA WAISAI KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Muhammad Rangga Alfaqih
NPP. 33.1205
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: ranggalfaqi11@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Abdurohim, S.Sos., M.Si.
Email: abdurohim@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The conservation tariff policy based on West Papua Governor Regulation Number 4 of 2019 aims to preserve the marine ecosystem in Raja Ampat. However, this policy has significantly impacted Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) dependent on the tourism sector, with revenue declining between 31% and 40% since its enforcement. Previous studies have largely examined conservation area management from ecological and environmental policy perspectives, while the economic empowerment dimension of MSMEs in the context of conservation tariff policy remains underexplored.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze MSME empowerment strategies and identify supporting and inhibiting factors in the implementation of the conservation tariff policy in Waisai District, Raja Ampat Regency.* ***Method:*** *This research uses a qualitative approach with a constructivism paradigm. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were determined by purposive sampling, consisting of MSME actors, the Office of Cooperatives and MSMEs, the Tourism Office, and Non-Governmental Organizations. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldaña (2014) model through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The results showed that the enabling strategy was implemented through policy socialization conducted only once without follow-up; the strengthening strategy involved 14 training sessions during 2023–2025 without post-training mentoring; the protection strategy remained weak as no specific compensation scheme existed; the supporting strategy was limited due to bureaucratic capital access; and the maintenance strategy was the weakest dimension with no structured monitoring. Supporting factors include local government commitment to conservation and MSME resilience in adapting, while inhibiting factors include limited capital, declining tourist visits, and suboptimal inter-agency coordination.* ***Conclusion:*** *This study concludes that MSME empowerment strategies in Waisai District have not been maximally implemented and recommends a more contextual, participatory, and sustainable empowerment approach so that MSMEs can survive and grow in balance with environmental conservation efforts.*

Keywords: *MSME Empowerment, Conservation Tariff, Supporting and Inhibiting Factors, Raja Ampat, Local Government Policy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan tarif konservasi berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 bertujuan melestarikan ekosistem laut di Raja Ampat. Namun, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada sektor pariwisata, dengan penurunan omzet antara 31% hingga 40% sejak kebijakan diberlakukan. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji pengelolaan kawasan konservasi dari perspektif ekologi dan kebijakan lingkungan, sementara dimensi pemberdayaan ekonomi UMKM dalam konteks kebijakan tarif konservasi belum mendapat perhatian memadai. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan UMKM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tarif konservasi di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling, terdiri dari pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungkinan dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan yang bersifat sekali dan tidak berkelanjutan; strategi penguatan melalui 14 kali pelatihan selama 2023–2025 namun tanpa pendampingan pascapelatihan; strategi perlindungan masih lemah karena tidak ada skema kompensasi khusus; strategi penyokongan terbatas karena akses permodalan yang birokratis; dan strategi pemeliharaan merupakan dimensi paling lemah tanpa monitoring terstruktur. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah terhadap konservasi dan ketangguhan UMKM dalam beradaptasi, sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan modal, penurunan kunjungan wisatawan, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan UMKM di Distrik Kota Waisai belum berjalan maksimal dan merekomendasikan pendekatan pemberdayaan yang lebih kontekstual, partisipatif, serta berkelanjutan agar UMKM mampu bertahan dan tumbuh seiring upaya konservasi lingkungan.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Tarif Konservasi, Faktor Pendukung dan Penghambat, Raja Ampat, Kebijakan Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Menurut Marwiyah (2022), keempat fungsi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan dan penjaminan kepentingan publik. Dalam konteks daerah kepulauan, fungsi ini semakin kompleks karena harus menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat secara bersamaan.

Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, merupakan salah satu destinasi wisata bahari terkemuka di dunia dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di bumi. Untuk menjaga kelestarian ekosistem tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tarif konservasi sebesar Rp 425.000 per kunjungan wisatawan. Kebijakan ini menjadi dasar hukum pemungutan retribusi konservasi yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi Kelautan dan Perikanan Raja Ampat.

Pemberlakuan tarif konservasi tersebut menimbulkan dampak ganda: di satu sisi mendorong pelestarian lingkungan laut, namun di sisi lain menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaku UMKM di Distrik Kota Waisai yang mayoritas bergantung pada sektor pariwisata, seperti warung makan, penyewaan speedboat, pedagang souvenir, dan penyedia jasa penginapan. Data lapangan menunjukkan penurunan omzet UMKM antara 31% hingga 40% sejak kebijakan tarif konservasi diberlakukan secara efektif.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat telah mengupayakan berbagai program pemberdayaan bagi UMKM terdampak. Namun, efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan mengingat kondisi UMKM yang belum menunjukkan pemulihan signifikan. Kajian mendalam terhadap strategi pemberdayaan yang diterapkan menjadi penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan belum optimalnya strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi dampak kebijakan tarif konservasi di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Gap penelitian yang ditemukan adalah bahwa studi-studi terdahulu mengenai Raja Ampat lebih banyak mengkaji aspek ekologi konservasi laut (Nuraini et al., 2024), tata kelola kawasan konservasi (Napasau et al., 2022), dan pariwisata berkelanjutan (Azizah & Abdullah, 2024), namun belum ada yang secara khusus menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dalam kerangka kebijakan tarif konservasi menggunakan teori pemberdayaan Suharto edi (2006) secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada kondisi riil pelaku UMKM di lapangan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan saat ini karena UMKM di Distrik Kota Waisai berada dalam kondisi rentan akibat tekanan kebijakan tarif konservasi yang belum diimbangi dengan program penyeimbang yang memadai, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh sebagai dasar perbaikan kebijakan pemberdayaan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Apabila tidak dilakukan, maka UMKM akan terus mengalami penurunan omzet secara persisten, tenaga kerja lokal kehilangan mata pencaharian, dan tujuan pembangunan ekonomi daerah berbasis pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat tidak akan tercapai secara optimal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus pemberdayaan UMKM dan konteks kebijakan konservasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian pemberdayaan UMKM dan tata kelola kawasan konservasi memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Napasau dkk. mengkaji kinerja UPTD Kawasan Konservasi Kelautan dalam pemungutan tarif layanan di Raja Ampat menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berfokus pada efektivitas BLUD dalam pengelolaan tarif konservasi (Napasau et al., 2022). Nuraini dkk. meneliti mekanisme dan kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi ekowisata bahari di Kawasan Konservasi Raja Ampat menggunakan mixed method dengan pendekatan kolaborasi multipihak, yang berfokus pada faktor keberhasilan pengelolaan ekowisata (Nuraini et al., 2024). Penelitian Azizah dan Abdullah membahas upaya menjaga Raja Ampat sebagai sustainable tourism melalui prinsip sustainability dan blue economy menggunakan studi pustaka kualitatif (Azizah & Abdullah, 2024). Selanjutnya, Eman dkk. mengkaji strategi pemberdayaan UMKM di Kota Manado oleh Dinas Koperasi menggunakan metode kualitatif, dengan objek pelaku UMKM dan aparatur dinas terkait (Eman et al., 2023). Adapun Hidayah dkk. meneliti strategi pemberdayaan UMKM melalui pelatihan oleh Disperindag Kota Magelang menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pelatihan sebagai instrumen penguatan kapasitas UMKM (Hidayah et al., 2022). Romadhoni dkk. meneliti pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Gowa menggunakan metode kualitatif (Romadhoni et al., 2022). Lubis dkk. mengkaji strategi pemberdayaan UMKM melalui Program Mekaar oleh PT. PNM dari perspektif ekonomi Islam menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan fokus pada akses permodalan sebagai dimensi penyokongan (Lubis et al., 2023). Ginting dkk. meneliti pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata menggunakan metode kualitatif, yang relevan untuk dimensi pemungkinan dan penguatan partisipasi komunitas (Ginting et al., 2022). Andayani dkk. mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 menggunakan metode kualitatif deskriptif, sebagai perbandingan kondisi UMKM yang terdampak krisis (Andayani et al., 2021). Sementara itu, Aini dkk. meneliti program strategis dalam mengatasi kendala kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari di Raja Ampat menggunakan metode kualitatif, yang relevan sebagai konteks spesifik lokasi penelitian (Aini et al., 2021). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing.

1.5 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dari segi fokus kajian yang secara khusus menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi kebijakan tarif konservasi menggunakan kerangka teori lima dimensi pemberdayaan Suharto edi (2006)—yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan—di konteks spesifik kawasan konservasi laut kelas dunia Raja Ampat. Kebaharuan penelitian ini juga terletak pada integrasi antara teori fungsi pemerintahan Labolo (2014) dengan analisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan UMKM dalam satu kerangka analisis yang kohesif, yang belum pernah dilakukan pada konteks kebijakan tarif konservasi di daerah kepulauan Indonesia.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi kebijakan tarif konservasi di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang strategi pemberdayaan UMKM dari perspektif para aktor yang terlibat langsung, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha. Paradigma konstruktivisme dipilih karena realitas sosial terkait pemberdayaan UMKM bersifat subjektif dan dikonstruksi melalui interaksi antara kebijakan, aktor, dan konteks lokal yang spesifik.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari informan yang berbeda, yakni pejabat Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, serta pelaku UMKM terdampak. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling kepada tujuh informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dengan fokus penelitian, terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Pariwisata, Kabid Koperasi dan UMKM, serta empat pelaku UMKM terdampak kebijakan tarif konservasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Penelitian dilakukan di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya pada periode Januari–April 2026.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi pemberdayaan UMKM di Distrik Kota Waisai berdasarkan lima dimensi teori pemberdayaan Suharto edi (2006), yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Selain itu, dianalisis pula faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tarif konservasi yang memengaruhi efektivitas strategi pemberdayaan tersebut.

3.1 Strategi Pemungkinan

Penulis menganalisis bahwa strategi pemungkinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan UMKM berkembang. Sosialisasi kebijakan tarif konservasi dilakukan sebagai upaya membuka akses informasi bagi pelaku UMKM. Kepala Dinas Pariwisata menyatakan bahwa integrasi UMKM dalam paket wisata bahari telah diupayakan untuk memperluas peluang usaha.

Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi hanya dilakukan sekali tanpa tindak lanjut, sehingga pemahaman pelaku UMKM masih sangat terbatas pada pengetahuan umum dan belum sampai pada tahapan adaptasi strategis. Sebagaimana dinyatakan Suharto edi (2006), strategi pemungkinan yang efektif mensyaratkan akses informasi yang relevan, dapat dipahami, dan ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pemungkinan baru berada pada tahap pasif dan belum berkembang menjadi upaya transformatif.

3.2 Strategi Penguatan

Strategi penguatan diwujudkan melalui 14 kali pelatihan manajemen usaha, pengolahan produk, dan digital marketing selama periode 2023–2025. Pemerintah daerah juga menyediakan pembinaan teknis secara berkala. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa program penguatan tersebut belum mampu menghasilkan perubahan kapasitas yang nyata pada pelaku UMKM. Pelatihan tidak rutin, tidak berbasis kebutuhan spesifik, dan tidak disertai pendampingan pascapelatihan, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak dapat diterapkan secara efektif dalam praktik usaha.

Kelemahan utama terletak pada pendekatan top-down yang tidak partisipatif, program dirancang berdasarkan pertimbangan pemerintah tanpa melibatkan pelaku UMKM dalam identifikasi kebutuhan spesifik. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan yang mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek program (Ginting et al., 2022).

3.3 Strategi Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan

Strategi perlindungan merupakan dimensi yang paling lemah. Pemerintah daerah merasa telah memberikan perlindungan melalui kerangka kebijakan umum seperti kemudahan perizinan, namun pelaku UMKM tidak merasakan perlindungan yang substantif terhadap dampak ekonomi yang diderita. Belum ada skema kompensasi atau keringanan khusus bagi UMKM yang omzetnya menurun akibat tarif konservasi, menciptakan kesenjangan persepsi yang signifikan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Strategi penyokongan berupa fasilitasi kredit, bantuan teknis, dan dukungan promosi melalui Dinas Pariwisata telah diupayakan namun terbatas karena keterbatasan anggaran. Akses permodalan menjadi kendala utama karena persyaratan agunan yang tidak terjangkau oleh pelaku UMKM. Kolaborasi lintas sektor dengan lembaga keuangan dan sektor swasta belum optimal, sehingga dukungan yang diberikan tidak menjawab kebutuhan riil penerima manfaat.

Strategi pemeliharaan merupakan dimensi paling kritis. Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin dan terstruktur. Setelah program selesai, tidak ada tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, menyebabkan program pemberdayaan bersifat sementara dan tidak menghasilkan dampak jangka panjang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar strategi pemeliharaan yang mensyaratkan mekanisme kelembagaan yang mampu memastikan keberlanjutan hasil pemberdayaan (Suharto edi, 2006).

Tabel 2 Ringkasan Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan UMKM

Strategi	Tingkat Pelaksanaan	Kelemahan Utama	Dampak terhadap UMKM
Pemungkinan	Sedang	Sosialisasi tidak intensif dan berkelanjutan	Pemahaman dan adaptasi masih rendah
Penguatan	Sedang	Kurangnya pendampingan pascapelatihan	Peningkatan kapasitas terbatas
Perlindungan	Rendah	Tidak ada skema kompensasi khusus	UMKM semakin rentan
Penyokongan	Rendah-Sedang	Anggaran terbatas dan akses permodalan sulit	Pertumbuhan usaha terhambat
Pemeliharaan	Rendah	Monitoring dan pendampingan tidak sustain	Program bersifat sementara

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara, 2026

Tabel 2Dampak Kebijakan Tarif Konservasi terhadap Omzet dan Tenaga Kerja UMKM

Pelaku UMKM	Omzet 2018 (Rp/bulan)	Omzet 2025 (Rp/bulan)	Penurunan (%)	Tenaga Kerja (Sebelum → Sesudah)
Budi Hartono	18.500.000	11.500.000	38%	5 → 3 orang
Siti Rahayu	9.800.000	5.900.000	40%	4 → 2 orang
Nuriyha	12.500.000	7.500.000	40%	3 → 2 orang
Ainun Kastela	7.200.000	5.000.000	31%	3 → 2 orang

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara, 2026

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Namun, layaknya temuan dalam kajian pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan konservasi, penelitian ini juga mengidentifikasi paradoks keberlanjutan yang menarik: kebijakan tarif konservasi yang bertujuan menjaga daya tarik wisata jangka panjang justru melemahkan fondasi ekonomi UMKM yang bergantung pada kunjungan wisatawan jangka pendek. Paradoks ini mencerminkan ketegangan antara logika konservasi ekologis dan logika pemberdayaan ekonomi lokal yang belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang kohesif.

Faktor pendukung yang mengakomodasi keberhasilan parsial pemberdayaan meliputi: (a) komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian ekosistem laut Raja Ampat yang diakui dunia internasional; (b) ketangguhan dan semangat adaptasi pelaku UMKM yang terus

berupaya berinovasi meski dalam keterbatasan, seperti mencari pasar alternatif dan mengembangkan produk baru; dan (c) potensi pariwisata bahari Raja Ampat yang tetap menjadi modal utama pemulihan ekonomi jangka panjang. Faktor-faktor penghambat yang perlu dikelola secara sistematis mencakup keterbatasan modal UMKM, penurunan kunjungan wisatawan, sosialisasi kebijakan yang tidak intensif, keterbatasan anggaran dan SDM pendamping, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi kebijakan tarif konservasi di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya secara umum belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori lima dimensi pemberdayaan Suharto edi (2006), kelima strategi pemberdayaan telah diupayakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata, namun belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan karena program masih bersifat umum, tidak tepat sasaran, tidak berbasis kebutuhan spesifik UMKM, serta tidak berkelanjutan.

Strategi pemungkinan telah dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan tarif konservasi, namun bersifat sekali dan tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan sehingga pemahaman pelaku UMKM masih berada pada tahap pasif. Strategi penguatan diwujudkan melalui 14 kali pelatihan manajemen usaha selama 2023–2025, namun tidak disertai pendampingan pascapelatihan dan tidak berbasis kebutuhan spesifik sehingga peningkatan kapasitas UMKM terbatas. Strategi perlindungan merupakan dimensi yang paling lemah karena tidak terdapat skema kompensasi atau keringanan khusus bagi UMKM yang terdampak penurunan omzet akibat tarif konservasi. Strategi penyokongan berupa fasilitasi kredit dan promosi telah diupayakan, namun terbatas karena kendala anggaran dan persyaratan akses permodalan yang tidak terjangkau oleh pelaku UMKM. Strategi pemeliharaan merupakan dimensi paling kritis karena monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, sehingga program pemberdayaan bersifat sementara dan tidak menghasilkan dampak jangka panjang.

Pelaksanaan kebijakan tarif konservasi dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian ekosistem laut Raja Ampat yang diakui dunia internasional, potensi pariwisata bahari Raja Ampat yang tinggi sebagai modal pemulihan ekonomi jangka panjang, serta ketangguhan dan semangat adaptasi pelaku UMKM dalam menghadapi keterbatasan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan modal UMKM, penurunan kunjungan wisatawan akibat kenaikan tarif konservasi, sosialisasi kebijakan yang tidak intensif, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pendamping, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi pendekatan pemberdayaan dari program sektoral menjadi sistem pemberdayaan terintegrasi yang kontekstual dan berkelanjutan, melalui: (1) sosialisasi kebijakan secara rutin dengan bahasa yang mudah dipahami pelaku UMKM; (2) pelatihan berbasis need assessment yang disertai pendampingan berkelanjutan; (3) instrumen perlindungan ekonomi khusus melalui alokasi sebagian pendapatan tarif konservasi untuk dana pengembangan UMKM; (4) pelembagaan sistem

monitoring dan evaluasi melalui Tim Pendamping UMKM Berkelanjutan; serta (5) kebijakan koordinasi terpadu yang mengintegrasikan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappeda dalam satu peta jalan pemberdayaan UMKM berbasis konservasi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada proses pemberdayaan sehingga hasil penelitian lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan program dibandingkan pengukuran kuantitatif keberhasilan program. Kedua, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengamatan terhadap perkembangan UMKM pascaprogram belum dapat dilakukan secara longitudinal, sehingga dampak jangka panjang strategi pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM belum tergambar secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih objektif efektivitas strategi pemberdayaan terhadap peningkatan omzet dan kesejahteraan UMKM. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada kajian komparatif antar kawasan konservasi di Indonesia untuk melihat pola pemberdayaan UMKM yang paling efektif dalam konteks kebijakan tarif konservasi. Selain itu, penelitian berikutnya perlu mengkaji lebih mendalam efektivitas mekanisme distribusi pendapatan tarif konservasi sebagai sumber pendanaan pemberdayaan UMKM lokal secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat beserta seluruh jajaran, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat beserta seluruh jajaran, para informan penelitian (pelaku UMKM di Distrik Kota Waisai), serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, informasi, dukungan, dan membantu kelancaran proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Abdurohim, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., Satria, A., Wahyuni, E. S., & Bengen, D. G. (2021). Program Strategis dalam Mengatasi Kendala Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat. *J. Kebijakan Sosek KP*, *11*(2), 127–142. https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9655

Azizah, N. N., & Abdullah, N. (2024). Upaya Menjaga Raja Ampat sebagai Sustainable Tourism Melalui Prinsip Sustainability dan Blue Economy. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(1), 50–61. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.618

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *6*(1), 83–88. https://doi.org/10.29210/3003906000

Eman, F. T., Rachman, I., & Pangemanan, F. N. (2023). Strategi Pemberdayaan UMKM di Kota Manado. *JURNAL GOVERNANCE*, *3*(1), 1–10.

Ginting, S., Sembiring, R., Arlina., Dewi, E., & Kristian P M, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, *2*(5), 10–19.

Hidayah, A. N., Sujatmiko., & Mahendradi, RM. (2022). Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, *6*(2), 1–14.

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Pers.

Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Mekaar oleh PT. PNM Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 949–962. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8348

Martini, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muhadam Labolo & Teguh Ilham. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Rajawali Pers.

Napasau, D., Suradinata, E., & Nurdin, I. (2022). Analisis Kinerja UPTD Kawasan Konservasi Kelautan dan Perikanan dalam Pemungutan Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan pada BLUD Kepulauan Raja Ampat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, *14*(2), 147–156. https://doi.org/10.54783/jv.v14i2.580

Nuraini., Satria, A., Wahyuni, E., & Bengen, D. G. (2024). Mekanisme dan Kunci Keberhasilan Pengelolaan Kolaborasi Ekowisata Bahari di Kawasan Konservasi Raja Ampat. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *10*(1), 25–40. https://doi.org/10.15578/marina.v10i1.13054

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.

Rachmawati, I., Ilham, M., & Amalia, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, *10*(1), 61–72.

Romadhoni, B., Akhmad, A., Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, *6*(3), 1074–1088. https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2457

Rumbino, S. G., & Safaruddin. (2025). Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung di Piaynemo Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. *Abdimas Indonesian Journal*, *5*(1), 399–412. https://doi.org/10.59525/aij.v5i1.638

Sadu Wasistiono & Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN Press.

Tjahya Supriatna. (2013). *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Nimas Multima.